

BAB V

KESIMPULAN

Konflik Palestina dan Israel memang bukanlah konflik baru di dunia Timur Tengah. Konflik keduanya merupakan konflik penjajahan yang dilakukan Israel. Kejahatan yang dilakukan oleh Israel menjadikan Palestina tidak bisa memperoleh kedaulatan sama seperti Israel yang memperoleh pengakuannya sebagai Negara yang berdaulat. Palestina pun telah menempuh berbagai cara untuk memperoleh pengakuan di dunia Internasional khususnya dalam organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang berlarut ini.

Bagi Palestina upaya menjadi anggota penuh PBB bukan sekedar untuk menegaskan keberadaan mereka sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat. Sebab, misi asli dari otoritas ini adalah untuk menegosiasikan perjanjian damai dengan Israel. Keanggotaan penuh PBB tentu dapat memperkuat posisi mereka dalam perundingan damai dengan Israel. Pemerintah Palestina akan mengupayakan dengan sungguh-sungguh keanggotaannya dalam PBB untuk mengakhiri ketidakadilan sejarah yang selama ini terjadi di negaranya dengan tujuan mencapai kebebasan dan kemerdekaan seperti negara-negara lain di dunia.

Namun, apa yang diharapkan oleh Palestina tidak sesuai dengan kenyataannya. Setelah mengajukan proposal kemerdekaan pada tanggal 23 September 2011 dan dibahas di Sidang Umum PBB yang bertempat di markas besar PBB New York, maka diputuskan untuk membawa isu tersebut kepada Dewan Keamanan PBB. Dan

Hal ini diharapkan PBB sebagai satu-satunya aparat yang harus dipenuhi sebagai

anggota tetap PBB yaitu Palestina harus didukung sedikitnya sembilan anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan tidak mendapat veto dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Tetapi ancaman veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB selalu menjadi bayang-bayang bagi Palestina, sehingga menjadikan langkah Palestina ini tidak berjalan mulus dan kemungkinan terpaksa menempuh opsi sebagai negara peninjau di PBB.

Menarik untuk dilihat adalah Kebijakan Politik Luar Negeri AS terhadap konflik yang saat ini masih berlangsung antara Palestina dan Israel. Bagaimana arah kebijakan AS di masa Obama yang terlihat adanya standar ganda. Dimana disatu sisi Obama terlihat mendukung perdamaian dan kesejahteraan Palestina, namun disisi lain Obama tidak pernah lepas dari kepentingan Israel. Tidak bisa dipungkiri kedekatan antara AS dan Israel membuat kebijakan AS selalu membela Israel. Hal ini membuat resolusi yang ada tidak membuahkan hasil apapun.

Berpihaknya AS kepada sekutunya Israel, membuat pihak Palestina yang semula berharap adanya perubahan saat Obama terpilih menjadi Presiden merasa dipermainkan. Otoritas Palestina harus berjuang kembali untuk mendapatkan kedaulatan Palestina seutuhnya dan mengakhiri kependudukan yang dilakukan oleh Israel. Berbagai cara telah ditempuh Palestina, hingga Palestina ingin bergabung dalam PBB dengan status anggota tetap. Untuk itu pada tanggal 21 September 2011 Palestina yang diwakili oleh Presiden Mahmud Abbas mengajukan Palestina menjadi anggota tetap di PBB.

Arah Politik Luar Negeri AS yang cenderung berpihak kepada sekutunya Israel menjadi hambatan besar bagi Palestina untuk meningkatkan status keanggotaannya di

PBB dari yang sebelumnya hanya sebagai pengamat menjadi anggota tetap PBB. Dengan melakukan berbagai cara Palestina berjuang untuk mendapatkan kedaulatannya. Dengan masuknya Palestina menjadi anggota PBB artinya Palestina bisa mendapatkan haknya sebagai Negara yang berdaulat.

Pada proses awal pengajuan Palestina menjadi anggota tetap PBB sudah diganjil dengan ancaman veto dari AS. Palestina yang semula optimis karena berhasil mendapatkan dukungan dari Sembilan Negara DK PBB menjadi pesimis setelah mendapat ancaman veto AS. untuk mendapatkan haknya Palestina harus mendapatkan dukungan 9 dari 15 negara DK PBB dan tanpa adanya veto dari anggota tetap DK PBB.

Setelah perjuangan panjang yang dilakukan Palestina, ancaman itu bukan hanya sekedar ancaman. Tidak adanya resolusi dalam DK PBB membuat langkah Palestina untuk menjadi anggota tetap PBB pun kandas. Hal ini disebabkan adanya veto dari AS yang mengatakan bahwa penyelesaian kasus Palestina Israel hanya bisa melalui negosiasi.

AS merupakan Negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, namun dalam kasus ini mengapa AS tidak bisa memberikan pengakuan terhadap Palestina padahal sebelumnya AS telah mengakui Kosovo sebagai sebuah Negara berdaulat. Politik Luar Negeri AS yang berpihak kepada Israel memang sudah tidak bisa disangkal lagi. Hubungann kedua Negara ini sudah bukan menjadi rahasia

Kelompok Kepentingan di Amerika Serikat, seperti yang di jelaskan dalam Bagan Multiple Otonomis Grup merupakan salah satu aktor yang sangat berpengaruh dalam kebijakan luar negeri AS. Salah satu kelompok kepentingan yang selalu menekan kebijakan AS terhadap isu di Timur Tengah khususnya Palestina adala American-Israel Publik Affairs Committee (AIPAC). Adanya artikulasi dari Kelompok Kepentingan ini akan menekan pembuat kebijakan dalam pemerintahan AS, yaitu lembaga Legislatif dan Eksekutif .

AIPAC merupakan salah satu lobi Israel yang paling terkenal di AS. Kelompok kepentingan yang sudah berdiri sejak 1951 ini menjadi kelompok lobi yang tidak pernah gagal untuk menekan kebijakan politik luar negeri AS yang berkaitan dengan kepentingan Israel. AIPAC melakukan segala cara untuk menekan para pembuat kebijakan di pemerintahan AS. AIPAC memberikan bantuan dana pada saat kampanye kepada para kandidat baik Kongres ataupun Presiden AS.

Beberapa cara yang dilakukan AIPAC untuk membuat kebijakan AS berpihak kepada Israel yaitu dengan melobi actor-aktor pembuat kebijakan AS yang paling berpengaruh, yaitu Kongres dan juga Presiden AS sekalipun. Dengan dana kampanye yang ditawarkan AIPAC membuat calon-calon kandidat yang mendapat sokongan dana dari AIPAC menduduki kursi tertinggi dalam pemerintahan AS. Ditambah dengan sistem incumbent di AS yang mana biasanya kandidat yang sudah terpilih akan terpilih kembali dalam pemilu selanjutnya. Sehingga membuat calon-calon AIPAC mulus berada di tataran pengambil kebijakan AS.

Tidak berhenti sampai disitu, AIPAC juga melancarkan lobinya terhadap

akan berpihak dan meminta bantuan dukungan dari AIPAC. Tak terkecuali dengan Barack Obama, Standar ganda yang dilakukan Obama merupakan bentuk kongkret dari keterikatan AS dengan Israel. Dalam pidatonya di depan petinggi AIPAC pun Obama dengan jelas mendukung setiap kebijakan Israel. Tak terkecuali terkait dengan masuknya Palestina ke PBB. Bahkan AS telah memberikan veto pada dewan keamanan PBB untuk menghentikan langkah Palestina. Dengan berbagai Press Release dan memo yang dikeluarkan oleh AIPAC dalam situs resminya, terbukti bahwa semua kebijakan AS telah dibawah control AIPAC.